

BAB 1

PENDAHULUAN

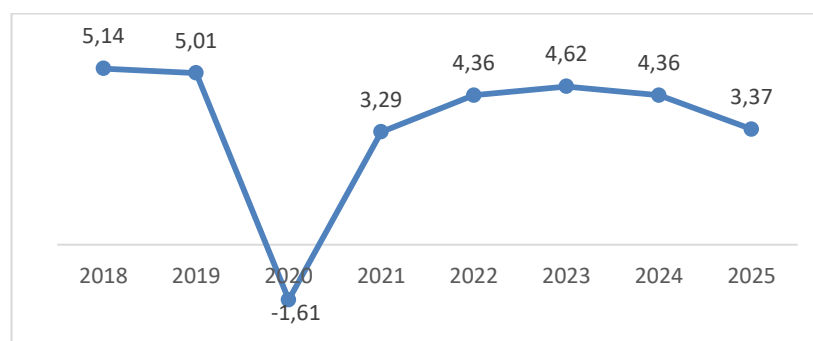
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah isu jangka panjang yang perlu diperhatikan oleh setiap negara untuk mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan. Setiap negara mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat karena mencerminkan sejauh mana suatu negara mampu meningkatkan produksi dan distribusi sumber daya ekonominya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi biasanya dinilai dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkatan daerah. Kenaikan angka PDB atau PDRB menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi menjadi penyebab sehat tidaknya perekonomian suatu negara dan pertumbuhan ekonomi menjadi syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Struktur perekonomian di Sumatera Barat didominasi oleh beberapa sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan sektor pariwisata. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pemebentukan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* daerah.

Bagi pemerintah, ekonomi yang tumbuh diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga

kerja yang harus meningkat, seiring dengan peningkatan angkatan kerja rata-rata pertahun. Disamping itu pergerakan ekonomi dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai kekuatan ekonomi domestik yang sangat penting (Rahman, 2017).

Menurut Silvia, (2019) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kunci dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara yang sangat terkait dengan kemajuan pembangunan nasional. Keberhasilan proses pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah dapat dinilai, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Di Sumatera Barat, fenomena yang muncul adalah adanya ketimpangan laju pertumbuhan antar kabupaten/kota. Sebagian daerah yang memiliki sektor unggulan, seperti pertanian, perdagangan, pariwisata maupun industri pengolahan, mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Sebaliknya daerah yang masih bergantung pada sektor primer mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas (Fifiyanti & Maryati, 2025). Berikut data Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2018-2025 (%)

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1 pada tahun 2018-2025 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 hingga 2019, kondisi ekonomi masih tergolong stabil dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,14% dan 5,01%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tajam hingga mencapai -1,61%. Kondisi ini dipicu oleh dampak COVID-19 menyebabkan terganggunya berbagai aktivitas ekonomi, seperti menurunnya konsumsi masyarakat, melemahnya sektor perdagangan, serta terhentinya aktivitas pariwisata.

Pada periode 2021 hingga 2023, perekonomian mulai mengalami pemulihan secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,29% pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 4,36% pada tahun 2022, dan mencapai 4,62% pada tahun 2023 yang merupakan titik tertinggi setelah pandemi. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, pelonggaran pembatasan, serta meningkatnya mobilitas dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 laju pertumbuhan kembali melambat menjadi 4,36% dan 3,37%. Hal ini menjelaskan bahwa walaupun sudah ada kemajuan dalam pemulihan, tetap ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi seperti ketidakpastian dalam ekonomi dunia, tekanan dari inflasi, dan realisasi investasi daerah yang belum mencapai hasil yang diharapkan, yang semuanya berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu parameter penting untuk menilai sejauh mana kemandirian fiskal suatu wilayah. PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya

sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pada konteks pembangunan daerah, PAD memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, kontribusi PAD di Sumatera Barat terhadap total pendapatan daerah masih tergolong relatif rendah. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah tidak sepenuhnya tercapai. Keadaan ini disebabkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi, serta masih adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah, terdapat perbedaan kemampuan antar kabupaten/kota dalam menghasilkan PAD. Daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intens, khususnya kota-kota besar, umumnya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang bergantung pada sektor primer. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan kapasitas fiskal antar wilayah.

Berdasarkan penelitian Saraswati, (2018) mengungkapkan bahwa PAD dan belanja modal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, meskipun penelitian ini belum memperhitungkan pengangguran sebagai aspek kunci dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga mengakui bahwa variabel yang dianalisis terbatas pada komponen PAD,

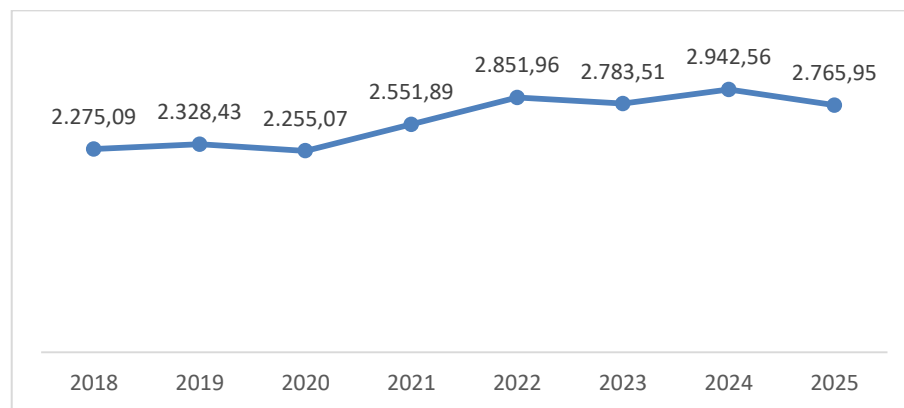
belanja modal, dan dana perimbangan, serta merekomendasikan penambahan variabel lain agar hasilnya lebih representatif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua penerimaan yang diperoleh dari sumber di dalam wilayah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan ketentuan daerah dan peraturan hukum yang berlaku. Sektor PAD sangat vital, karena sektor ini menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan lokal (Damanik, 2022).

Akselerasi pertumbuhan ekonomi regional memiliki perbedaan dampak antar wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi masing-masing yang dimana pendapatan asli daerah (PAD) adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa besar kapasitas fiskal suatu wilayah dalam mendukung pembangunan secara mandiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat (Nurmala *et al*, 2025). Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan penerimaan dari berbagai sumber tersebut, yang secara langsung mempengaruhi tingkat PAD (Sirait, 2019).

Menurut Tuwo *et al.*, (2021) Tujuan utama dari desentralisasi fiskal yaitu membangun kemandirian suatu wilayah, di mana diharapkan pemerintah daerah dapat menggali sumber keuangan lokal, terutama dari PAD. Kawasan yang mampu menunjukkan pertumbuhan PAD yang baik berpotensi mendapatkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan

berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berikut data pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1. 2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat Tahun 2018-2025 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2026

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan pendapatan asli daerah di Sumatera Barat tahun anggaran 2018-2025 mengalami fluktuasi cenderung naik. Pada tahun 2018, realisasi PAD tercatat sebesar Rp2.275,09 juta dan mengalami kenaikan menjadi Rp2.328,43 juta pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp2.255,07 juta, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah. Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

pada periode 2021 hingga 2024, PAD menunjukkan tren pemulihan yang cukup signifikan. Nilai PAD meningkat menjadi Rp2.551,89 juta pada tahun 2021 dan kembali naik menjadi Rp2.851,96 juta pada tahun 2022. Meskipun sempat mengalami koreksi pada tahun 2023 menjadi Rp2.783,51 juta. PAD kembali

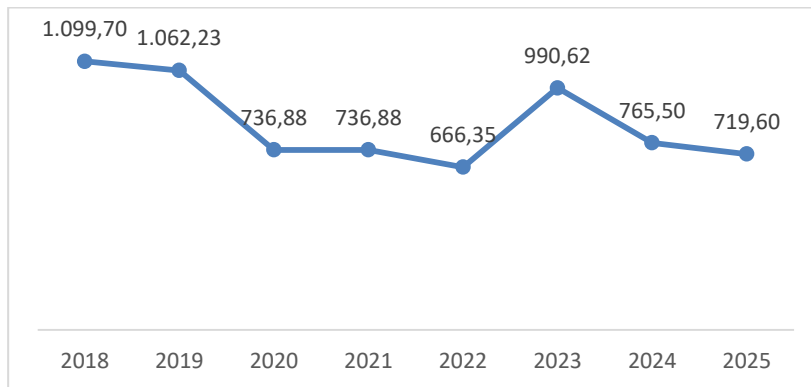
mengalami kenaikan dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 yang mencapai Rp2.942,56 juta. Situasi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kegiatan ekonomi daerah serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah. Akan tetapi, pada tahun 2025 PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp2.765,95 juta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses pemulihan telah berlangsung, kinerja pendapatan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi, fluktuasi daya beli masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber-sumber PAD secara berkelanjutan.

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pengeluaran pemerintah daerah yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. Di Sumatera Barat, alokasi belanja modal diarahkan pada penyediaan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, serta sarana kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Optimalisasi belanja modal diharapkan dapat menciptakan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, efektivitas realisasi belanja modal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, perencanaan yang belum optimal, serta kendala dalam pelaksanaan proyek.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang memberikan manfaat lebih dari

satu tahun anggaran dan berpotensi menambah kekayaan atau aset daerah, serta menambah pengeluaran rutin seperti biaya pemeliharaan di kategori belanja administrasi umum. Belanja modal dapat dimanfaatkan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah, termasuk peralatan, infrastruktur, dan properti lainnya. Belanja modal merupakan salah satu pengeluaran pemerintah yang cukup besar selain barang dan jasa (Laodini, 2023). Pengeluaran ini ditujukan untuk menambah aset daerah seperti jalan, gedung, tanah dan lain-lain. Selain itu tanggung jawab pemerintah juga dalam menyediakan barang publik kepada masyarakat. Besarnya belanja modal seharusnya diikuti dengan keefektifan belanja modal yang ditujukan untuk kepentingan publik akan secara langsung berdampak kepada kegiatan pembangunan di daerah tersebut.

Belanja modal daerah juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah mengeluarkan belanja modal untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi, ini dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan meningkatkan efisiensi produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB (Saputra *et al.*, 2023). Berikut data belanja modal di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1.3 Perkembangan Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2018-2025 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2026

Pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa belanja modal di Sumatera Barat tahun anggaran 2018-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp1.099,70 juta, yang kemudian turun menjadi Rp1.062,23 juta di tahun 2019. Penurunan lebih drastis terlihat antara tahun 2020 hingga 2022, dengan angka belanja modal masing-masing sebesar Rp736,88 juta untuk tahun 2020 dan 2021, serta menurun kembali menjadi Rp666,35 juta pada tahun 2022. Situasi ini menunjukkan adanya tekanan pada kapasitas belanja pemerintah daerah, yang salah satunya dipengaruhi oleh dampak COVID-19 sehingga terjadi realokasi anggaran untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana belanja modal naik menjadi Rp990,62 juta. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya kondisi fiskal daerah serta meningkatnya kembali prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan investasi publik. Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 belanja modal kembali mengalami penurunan menjadi

Rp765,50 juta dan Rp719,60 juta. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi pemulihan, pengalokasian belanja modal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, perubahan prioritas kebijakan, serta ketidakpastian kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa belanja modal daerah bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah.

Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi struktural dan siklus ekonomi daerah. Secara umum, pengangguran masih menjadi permasalahan yang relevan, terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertumbuhan angkatan kerja dan kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Meskipun terdapat kecenderungan perbaikan pada periode tertentu, fluktuasi tingkat pengangguran tetap terjadi seiring perubahan aktivitas ekonomi, investasi, dan kebijakan pembangunan daerah. Fenomena pengangguran di Sumatera Barat juga berkaitan erat dengan karakteristik tenaga kerja, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, dominasi sektor informal serta keterbatasan lapangan kerja formal turut memperbesar potensi terjadinya pengangguran terbuka. Pengangguran tidak hanya mencerminkan kurangnya kesempatan kerja, tetapi juga menunjukkan adanya mismatch antara kualifikasi tenaga kerja dan permintaan pasar.

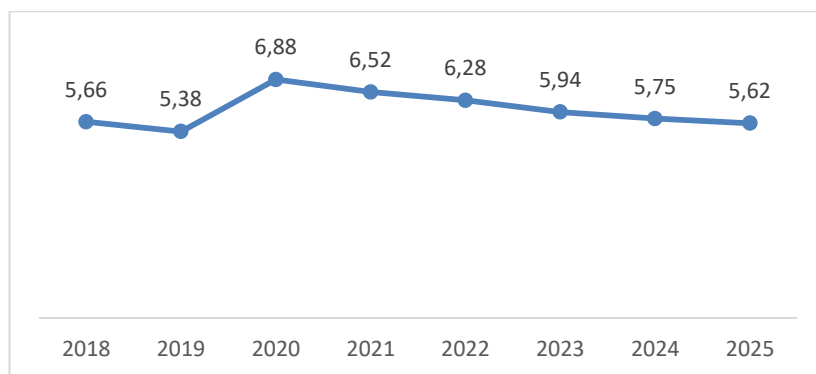
Menurut Imanto *et al.*, (2020) pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dianalisis melalui berbagai indikator ekonomi, salah satunya adalah angka pengangguran. Dengan melihat tingkat pengangguran, kita dapat menilai

kondisi ekonomi suatu negara atau daerah apakah sedang tumbuh, stagnan, atau berkurang. Selain itu, indikator pengangguran juga digunakan untuk mengevaluasi ketimpangan dalam distribusi pendapatan di masyarakat daerah atau negara tersebut. Tingginya angka pengangguran dapat disebabkan oleh perubahan dalam angkatan kerja yang cepat tanpa diiringi kesempatan kerja yang memadai, imbas dari rendahnya pertumbuhan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap.

Apabila ditinjau dari segi ekonomi, tingginya pengangguran berdampak pada rendahnya perekonomian dan berdampak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak pada beberapa individu, pengangguran dapat meningkatkan jumlah kemiskinan sehingga mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu negara (Resti, 2021). Tingginya angka pengangguran menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini terjadi karena banyaknya individu yang berada di usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan. sehingga mereka tidak ikut berkontribusi dalam kegiatan produksi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Hendri, 2022).

Pengangguran merupakan masalah yang sangat merugikan, dengan dampak yang signifikan bagi ekonomi dan komunitas. Tingginya angka pengangguran berakibat negatif bagi ekonomi, individu, dan masyarakat, di mana jumlah pengangguran yang banyak akan menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan maksimal. Produktivitas dan pendapatan masyarakat akan mengalami penurunan, yang berpotensi memicu kemiskinan, kejahatan, dan isu sosial lainnya. Peningkatan tingkat pengangguran dapat

mengakibatkan efek merugikan bagi perekonomian suatu negara, di mana ketidakaktifan seseorang dalam bekerja menghalangi mereka untuk menghasilkan barang dan jasa. Akibatnya, pendapatan per kapita akan menurun. Hal ini berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat, yang selanjutnya menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1. 4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat Tahun 2018-2025 (%)

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2026

Gambar 1.4 menunjukkan Pada tahun 2018-2025 tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, TPT tercatat sebesar 5,66% dan mengalami penurunan menjadi 5,38% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 6,88%, yang mencerminkan dampak tekanan ekonomi akibat COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja, seperti meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja.

Pada pada periode 2021 hingga 2025, TPT menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Tingkat pengangguran menurun menjadi 6,52% pada tahun 2021, kemudian terus mengalami penurunan menjadi 6,28% pada tahun 2022, 5,94%

pada tahun 2023, 5,75% pada tahun 2024, dan mencapai 5,62% pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya pemulihan kondisi pasar tenaga kerja seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Secara keseluruhan, fenomena yang tergambar dalam grafik ini menunjukkan bahwa lonjakan pengangguran pada masa krisis bersifat sementara, diikuti oleh proses penyesuaian dan pemulihan yang mendorong penurunan tingkat pengangguran secara gradual dalam jangka menengah.

Penelitian Fifiyanti & Maryati, (2025) yang berjudul Pengaruh PAD, belanja modal, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* dari tahun 2011-2023. Dalam penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal, dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian hanya mencakup tiga variabel independen (PAD, Belanja Modal, dan IPM).

Penelitian Tuwo *et al.*, (2021) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan data *time series* periode 2009-2018. Hasil penelitiannya yaitu Pendapatan asli daerah memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal memberikan pengaruh negatif dan juga tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. Perbedaan dari penulis ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitian, data yang digunakan dan variabel penelitian

Berdasarkan sumber-sumber penelitian terdahulu yang telah dikutip dapat dilihat bahwa penelitian banyak yang berfokus pada pendapatan asli daerah, belanja modal dan indeks pembangunan manusia. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih memfokuskan analisis pendapatan asli daerah, belanja modal dan menambah pengangguran sebagai variabel bebas menggantikan indeks pembangunan manusia pertumbuhan ekonomi daerah juga di pengaruhi oleh faktor lain seperti investasi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan infrastruktur. Penelitian sebelumnya, banyak menggunakan metode regresi data panel menggunakan pendekatan *fixed effect model*, regresi linear berganda. Peneliti ini ingin menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) menggunakan observasi 31 tahun dari tahun 1995-2025 dan menggunakan data terkini.

Oleh sebab itu penelitian ini ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat”**. Karena karakteristik, struktur ekonomi, serta dinamika ketenagakerjaan di provinsi ini berbeda dari wilayah yang telah diteliti sebelumnya. Dengan data terbaru dan menggunakan analisis data jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian penulis bertujuan untuk penelitian yang lebih terfokus pada Sumatera Barat untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih akurat dan menganalisis ketiga faktor tersebut untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Setelah mempelajari pendapatan asli daerah, pengeluaran modal, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi secara akademis, diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dan dapat dapat memperdalam pemahaman teoritis tentang bagaimana instrumen fiskal daerah (PAD dan belanja modal) berinteraksi dengan variabel ketenagakerjaan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi pihak lain atau peneliti selanjutnya, hasil ini bisa memberikan acuan atau referensi dalam melakukan penelitian yang serupa serta mengembangkan model dengan memasukkan variabel lain sebagai faktor tambahan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pemahaman tentang dampak pendapatan asli daerah, belanja modal, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
2. Dalam praktiknya, hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan untuk memperluas wawasan dan menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak seperti dinas tenaga kerja mengenai bagaimana kondisi pengangguran berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi, dan juga untuk kalangan industri dan masyarakat umum.